

► TRANS-SUMATRA

Penugasan BUMN Perlu Diperjelas

JAKARTA—Pemerintah diminta merumuskan bentuk penugasan terhadap BUMN yang ditunjuk menggarap jalan tol trans-Sumatra sepanjang 2.700 kilometer.

Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Fathur Rochman menuturkan pemerintah perlu dengan jelas menentukan skema penunjukan BUMN Karya.

Menurutnya, peraturan pemerintah untuk menugaskan BUMN Karya yang tengah digodok perlu merumuskan dengan jelas skema bisnisnya.

"Hutama Karya itu apakah menjadi developer atau operator jalan tol? Kalau perseroan adalah developer jalan tol yang merupakan perpanjangan pemerintah, maka tidak akan jadi masalah. Namun jika kalau menjadi operator, tentu swasta juga berminat," ujarnya ketika dihubungi *Bisnis*, Kamis (9/5).

Dia menilai pemerintah tidak memberi ruas yang wajar kepada swasta jika BUMN Karya yang ditugaskan menggarap trans-Sumatra sekaligus menjadi operator. BUMN Karya yang ditunjuk harus menjadi developer dengan seluruh dana investasi dari pemerintah.

Setelah dibangun, pemerintah dapat melakukan tender operator kepada semua pihak yang berminat. Jika saat beroperasi ruas tersebut belum layak secara finansial, pemerintah dapat mengoperasikan hingga layak untuk kemudian ditenderkan operasinya kepada swasta.

Pemerintah sebelumnya menunjuk PT Hutama Karya untuk membangun sejumlah ruas jalan tol trans-Sumatra. Kemudian merevisi dengan mendorong BUMN untuk terlibat dalam proyek bernilai Rp426 triliun tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat terdapat dua proyek yang bisa men-

Ruas Utama Proyek Jalan Tol Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30

Sumber: Kementerian PU

jadi prioritas pembangunan karena memiliki *internal rate of return* (IRR) yang baik.

Kedua ruas itu ialah Lampung-Palembang 358 km dengan IRR sebesar 17% dan Pekanbaru-Medan sepanjang 548 km dengan IRR mencapai 16%.

Namun besaran IRR itu masih jauh dari kelayakan. Idealnya suatu ruas dinilai layak secara finansial jika memiliki IRR minimal 18%, sehingga jalan tol trans-Sumatra sangat membutuhkan dana dukungan pemerintah.

TRANS-JAWA

Sementara itu, Ditjen Bina Marga Kementerian PU kembali memulai pembebasan lahan tiga ruas jalan tol trans-Jawa yang mangkrak pada awal bulan ini, menyusul terbentuknya kesepakatan di antara badan usaha jalan tol tersebut.

Ketiga ruas yang mangkrak tersebut yakni Batang-Semarang, Pemalang-Batang, dan Pemalang-Pejagan.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah I Ditjen Bina Marga Jonggi Panangian mengatakan setelah dilakukan pembicaraan dan diskusi, Ditjen Bina Marga bersama dengan ketiga BUJT tersebut menyepakati pembebasan lahan dilakukan bersamaan. (Dimas Novita S. & Thomas Mola)